



---

**PERAN PEMBELAJARAN PKN DALAM MEMBANGUN KEPEKAAN  
TERHADAP HUKUM LALU LINTAS (STUDI KASUS PADA SISWA KELAS  
VIIB SMPN 3 SRAGEN)**Ita Anggita Purwanti<sup>1</sup>, Siti Supeni<sup>2</sup>, Anita Trisiana<sup>3</sup>

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Uniiiversitas Slamet Riyadi

Surakarta

[Itaanggita09@gmail.com](mailto:Itaanggita09@gmail.com)**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui peran pembelajaran PKN dalam membangun kesadaran hukum lalu lintas di kelas VIIB SMPN 3 Sragen, 2) untuk menentukan kendala-kendala yang ada dalam membangun kesadaran hukum lalu lintas di kelas VIIB SMPN 3 Sragen, 3) untuk menentukan solusi efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas di kelas VIIB SMPN 3 Sragen. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIB SMPN 3 Sragen pada tahun ajaran 2023/2024 dan guru PKN. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti bertindak sebagai pewawancara langsung untuk menggali data melalui siswa dan guru PKN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pembelajaran PKN dalam membangun kesadaran hukum lalu lintas siswa di kelas VIIB SMPN 3 Sragen berada pada siswa itu sendiri dengan lingkungan (hubungan sosial dan lingkungan sekitar), serta hubungan antara orang tua dan siswa. Cara siswa memahami peraturan lalu lintas akan menentukan generasi yang memahami hukum. Dengan pemahaman dan pengenalan sejak awal, diharapkan upaya untuk membangun kesadaran hukum lalu lintas dalam pembelajaran PKN di kelas VIIB dapat menghasilkan kepribadian yang kooh sebagai dasar bagi warga negara yang bertanggung jawab dan handal serta menjadi lebih berkualitas.

**Kata Kunci: Pembelajaran PKN, Membangun Kesadaran Hukum, dan Lalu Lintas**

### **Abstract**

*The objectives of this study were 1) to determine the role of civics learning in building awareness of traffic laws in class VIIB of SMPN 3 Sragen, 2) to determine what obstacles were in building awareness of traffic laws in class VIIB of SMPN 3 Sragen, 3) to determine what effective solutions were to increase awareness of traffic laws in class VIIB of SMPN 3 Sragen. This research is a qualitative research using a descriptive approach. The subjects in this study were students in class VIIB of SMPN 3 Sragen in the 2023/2024 academic year and Civics teachers. Data collection in this study was taken through interviews, observations, and documentation. The researcher acted as a direct interviewer to explore data through students and Civics teachers. The results of this study indicated that the role of civics learning in building traffic law awareness of students in class VIIB of SMPN 3 Sragen was in the students themselves with the environment (social and surrounding relationships), as well as the relationship between parents and students). The way students in understanding traffic regulations would determine the generation that understood the law. With understanding and introduction from the beginning, it is hoped that efforts to build traffic law awareness in civics learning in class VIIB can produce a solid personality as a foundation for responsible and reliable citizens and become more qualified.*

**Keyword: Civics Learning, Building Legal Awareness, and Traffic.**

## PENDAHULUAN

Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memegang peranan krusial dalam membangun moral anak bangsa karena mereka tidak hanya mengajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika dan integritas yang fundamental. Melalui kurikulum yang membahas prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia, guru PKn membantu membentuk karakter siswa, membekali mereka dengan kemampuan untuk berpikir kritis dan bertindak secara bertanggung jawab dalam masyarakat. Dengan memberikan contoh yang baik dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, guru PKn berkontribusi langsung dalam menciptakan generasi muda yang memiliki komitmen kuat terhadap moral dan nilai-nilai kebangsaan, yang pada akhirnya akan mendukung kemajuan dan keharmonisan bangsa (Pratiwi & Trisiana, 2020).

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab (Sanusi & Darmawan, 2016). Penguatan pendidikan kewarganegaraan dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai seperti watak, karakter, sikap, atau kebiasaan sehari-hari yang mencerminkan seorang warga negara yang baik. Contoh dari nilai-nilai ini meliputi sikap religius, toleransi, kejujuran, keadilan, demokrasi, penghargaan terhadap perbedaan, penghormatan terhadap hukum dan hak orang lain. Nilai-nilai ini diharapkan dapat

diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat (Trisiana, 2020).

Kesadaran akan hukum lalu lintas adalah aspek fundamental dalam membangun masyarakat yang tertib dan aman dalam bertransportasi. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki populasi besar dan beragam serta infrastruktur transportasi yang terus berkembang, kesadaran ini menjadi sangat penting. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah-sekolah diharapkan dapat memfasilitasi penanaman pemahaman mendalam mengenai peraturan lalu lintas kepada siswa, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan patuh terhadap hukum (Wisudawati, 2018).

Meskipun pemerintah dan pihak sekolah telah berupaya keras untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai hukum lalu lintas melalui kurikulum dan berbagai program pendidikan, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan pembelajaran dan hasil yang dicapai. Pelanggaran lalu lintas yang terus terjadi dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan remaja menandakan bahwa efektivitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) saat ini masih belum optimal (Sutrisno, 2018). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai inisiatif telah diluncurkan, pemahaman dan penerapan hukum lalu lintas oleh siswa belum sesuai dengan harapan. Hal ini menuntut evaluasi dan perbaikan dalam metode pengajaran serta pendekatan yang digunakan, agar pembelajaran PKn dapat lebih efektif

dalam meningkatkan kesadaran hukum dan meminimalisir pelanggaran lalu lintas di kalangan remaja (Belladonna & Anggraena, 2019).

SMPN 3 Sragen, khususnya di kelas VIIB, merupakan salah satu institusi pendidikan yang menerapkan pembelajaran PKn sebagai bagian dari kurikulum mereka. Dalam upaya memahami bagaimana PKn memengaruhi kesadaran hukum lalu lintas siswa, penting untuk melakukan kajian mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara komprehensif peran PKn dalam membangun kesadaran hukum lalu lintas di kalangan siswa kelas VIIB SMPN 3 Sragen. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran PKn dan mencari solusi efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas.

Dengan mengevaluasi peran PKn dan kendala yang ada, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengembangkan kurikulum merdeka dan dapat memberikan pengetahuan yang berharga serta pembelajaran yang lebih efektif. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menemukan strategi yang dapat memperbaiki metode pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya memahami teori hukum lalu lintas tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta generasi yang lebih sadar hukum dan bertanggung jawab di jalan raya, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih aman dan tertib.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Pendidikan Kewarganegaraan**

Teori Pendidikan Kewarganegaraan menekankan peran fundamental pendidikan dalam membekali siswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Teori ini berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya sekadar memberikan informasi mengenai struktur pemerintahan atau hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga mengembangkan karakter dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan hukum.

(Setiarsih, 2017) menjelaskan bahwa tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk individu yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap nilai-nilai demokrasi, hukum, serta etika sosial. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan mengajarkan siswa tentang hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta mengajarkan pentingnya mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Hal ini meliputi pengembangan karakter yang mendukung integritas, kejujuran, dan kepatuhan terhadap hukum serta norma-norma sosial.

Dalam konteks penelitian ini, teori Pendidikan Kewarganegaraan memberikan landasan untuk memahami bagaimana mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan dalam menanamkan kesadaran hukum lalu lintas pada siswa. Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai sarana untuk

mengintegrasikan nilai-nilai hukum lalu lintas ke dalam kurikulum dan metode pengajaran di sekolah.

PKn tidak hanya mencakup penyampaian materi tentang peraturan lalu lintas tetapi juga melibatkan metode pengajaran yang dirancang untuk membentuk sikap dan perilaku siswa dalam konteks hukum lalu lintas. Ini termasuk penggunaan metode yang interaktif, seperti simulasi lalu lintas, diskusi kasus, dan role-playing, yang membantu siswa memahami dan menginternalisasi pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar tentang hukum lalu lintas secara teori tetapi juga mengalami bagaimana menerapkannya dalam situasi nyata, yang pada gilirannya meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum lalu lintas (Asyafiq, 2016).

Dengan kata lain, teori Pendidikan Kewarganegaraan membantu menjelaskan bagaimana PKn dapat berfungsi sebagai platform untuk mengajarkan dan mempromosikan kesadaran hukum lalu lintas, serta bagaimana kurikulum dan metode pengajaran dapat diadaptasi untuk mencapai tujuan tersebut. Ini memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi efektivitas PKn dalam membentuk perilaku dan sikap siswa terhadap hukum lalu lintas, serta menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut.

### **Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)**

Teori Pembelajaran Sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura (1977) merupakan salah satu teori yang signifikan dalam memahami bagaimana individu memperoleh perilaku baru melalui proses observasi dan peniruan. Bandura mengemukakan bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan terhadap tindakan orang lain serta konsekuensi yang mengikuti tindakan tersebut. Menurut teori ini, individu dapat mempelajari perilaku baru, sikap, dan keterampilan dengan mengamati bagaimana orang lain berperilaku dan bagaimana hasil dari perilaku tersebut memengaruhi mereka (Wahyuni & Fitriani, 2022).

Dalam konteks pembelajaran hukum lalu lintas, teori Pembelajaran Sosial sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana siswa dapat memahami dan menerapkan peraturan lalu lintas melalui observasi dan peniruan. Misalnya, jika siswa mengamati perilaku orang dewasa atau teman sebaya yang patuh terhadap peraturan lalu lintas, mereka cenderung meniru perilaku tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya peran model peran atau contoh dalam proses pembelajaran. Model peran yang menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dapat memberikan contoh konkret kepada siswa tentang bagaimana seharusnya bertindak di jalan raya.

Bandura mengidentifikasi bahwa ada beberapa komponen kunci dalam teori Pembelajaran Sosial, termasuk perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasi. Dalam

hal ini, perhatian merujuk pada bagaimana siswa memperhatikan dan memahami perilaku yang diperlihatkan oleh model peran. Retensi melibatkan kemampuan siswa untuk mengingat dan menyimpan informasi tentang perilaku yang diamati. Reproduksi adalah proses di mana siswa meniru atau mengaplikasikan perilaku yang telah mereka pelajari, sedangkan motivasi menentukan apakah siswa terdorong untuk melakukan perilaku tersebut.

Dalam penelitian ini, teori Pembelajaran Sosial relevan untuk menjelaskan bagaimana pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang efektif dapat memanfaatkan prinsip-prinsip tersebut untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang hukum lalu lintas. Pengajaran yang melibatkan model peran, simulasi, dan kegiatan praktis dapat membantu siswa menginternalisasi peraturan lalu lintas dengan lebih baik. Misalnya, penggunaan simulasi lalu lintas yang melibatkan siswa dalam situasi yang mirip dengan keadaan nyata dapat membantu mereka memahami pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan bagaimana melakukannya dengan benar. Selain itu, kegiatan praktis yang melibatkan peran aktif siswa, seperti role-playing atau diskusi kasus, dapat memberikan pengalaman langsung dan memperkuat pembelajaran yang terjadi melalui observasi (Wahyuni & Fitriani, 2022).

Dengan menerapkan teori Pembelajaran Sosial dalam pengajaran PKn, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan interaktif,

di mana siswa tidak hanya belajar tentang peraturan lalu lintas dari buku teks tetapi juga melalui pengalaman langsung dan pengamatan terhadap perilaku yang diharapkan. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan penerapan yang lebih efektif terhadap hukum lalu lintas, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh teori Pembelajaran Sosial.

## **METODE**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggali lebih dalam tentang peran PKn Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun kesadaran hukum lalu lintas di kalangan siswa kelas VIIB SMPN 3 Sragen. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh PKn mempengaruhi kesadaran hukum lalu lintas siswa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyelami sudut pandang dari pengalaman pribadi para siswa dan guru, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran dan kesadaran hukum lalu lintas.

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi dalam pembelajaran PKn di kelas VIIB SMPN 3 Sragen. Fokus penelitian ini adalah pada deskripsi peran PKn, tantangan yang dihadapi dalam proses belajar serta solusi dapat meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas. Dengan metode ini, penelitian tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau

membandingkan variabel secara kuantitatif, melainkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi yang ada.

Subjek penelitian meliputi siswa kelas VIIB SMPN 3 Sragen dan guru PKn di sekolah tersebut. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan siswa dan guru untuk menggali informasi tentang pengalaman dan pandangan mereka mengenai pembelajaran PKn serta kendala yang dihadapi. Selain itu, observasi dilakukan guna memahami secara langsung jalannya proses belajar dan dokumentasi digunakan untuk menganalisis silabus, materi ajar, serta catatan hasil belajar siswa. Teknik-teknik ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih detail dan mendalam mengenai peran PKn dalam membangun kesadaran hukum lalu lintas.

## **HASIL**

### **1. Peran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Kesadaran Tentang Hukum Lalu Lintas Di Kelas VIIB SMPN 3 Sragen**

Penguatan Pancasila dalam perbuatan merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa nilai-nilai dasar negara tercermin dalam tindakan sehari-hari masyarakat. Ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip Pancasila—seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial—dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan

sosial, etika kerja, hingga kebijakan publik. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap keputusan dan tindakan, individu dan institusi berperan aktif dalam membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan berkeadaban. Hal ini tidak hanya memperkuat identitas nasional tetapi juga memastikan bahwa Pancasila tetap relevan sebagai landasan hukum dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Ayu & Trisiana, 2017).

Membangun kesadaran hukum, termasuk hukum lalu lintas, di kalangan siswa merupakan peran krusial yang diemban oleh (PKn) Pembelajaran Pendidikan. Di SMPN 3 Sragen, khususnya di kelas VIIB, materi PKn dirancang untuk tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan peraturan, termasuk peraturan lalu lintas. Implementasi PKn di kelas VIIB bertujuan membentuk karakter siswa yang tidak hanya sadar akan peraturan hukum, tetapi juga dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka.

PKn bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang peduli terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks hukum lalu lintas, PKn berfungsi untuk menanamkan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai aturan lalu lintas yang meliputi rambu-rambu, batas kecepatan, serta etika dan

perilaku yang harus diikuti saat berkendara. Dengan demikian, pembelajaran PKn diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih sadar hukum dan bertanggung jawab dalam bertransportasi.

Melalui kurikulum PKn, siswa diperkenalkan pada konsep dasar hukum lalu lintas dan pentingnya mematuhi peraturan tersebut. Materi ini diharapkan dapat membekali siswa dengan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi pelopor keselamatan di jalan raya. Selain itu, pembelajaran PKn juga berfungsi untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan (Oktari & Dewi, 2021).

Meskipun memiliki tujuan yang jelas, implementasi PKn di kelas VIIB SMPN 3 Sragen menghadapi beberapa tantangan. Salah satu kendala utama yang diidentifikasi adalah kurangnya pemahaman mendalam di kalangan siswa tentang bagaimana peraturan lalu lintas diterapkan dalam situasi nyata. Meskipun materi tentang hukum lalu lintas diajarkan di kelas, sering kali siswa tidak dapat mengaitkan teori dengan praktik sehari-hari mereka.

Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan pengajaran yang lebih interaktif dan kontekstual. Misalnya, penggunaan metode simulasi, studi kasus, atau kegiatan lapangan yang melibatkan situasi lalu lintas nyata dapat membantu siswa mengaitkan teori dengan praktik. Simulasi berkendara, kunjungan ke tempat-

tempat yang menerapkan hukum lalu lintas, atau kerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan kegiatan sosialisasi dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan aplikatif.

Selain itu, faktor eksternal seperti dukungan dari orang tua dan masyarakat juga mempengaruhi efektivitas PKn dalam membangun kesadaran hukum lalu lintas. Keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran dan penerapan aturan lalu lintas di rumah dapat memperkuat pemahaman siswa. Dengan adanya diskusi rutin mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan penerapan disiplin di rumah, siswa dapat lebih memahami dan menghargai aturan yang diajarkan di sekolah (Rizal, 2020).

Dukungan dari komunitas lokal, seperti kepolisian dan instansi terkait, juga memainkan peran penting dalam memberikan edukasi dan sosialisasi tentang hukum lalu lintas. Kegiatan seperti seminar, workshop, atau kampanye keselamatan lalu lintas yang melibatkan siswa dapat memperkaya pengalaman belajar mereka dan memberikan perspektif yang lebih luas tentang pentingnya keselamatan di jalan.

Untuk meningkatkan efektivitas PKn dalam membangun kesadaran hukum lalu lintas, beberapa strategi dapat diterapkan:

- a. Pendekatan Interaktif: Menggunakan metode pengajaran yang interaktif seperti simulasi



- berkendara, studi kasus, dan kegiatan lapangan yang melibatkan situasi lalu lintas nyata.
- b. Keterlibatan Orang Tua: Meningkatkan partisipasi orang tua dalam proses pembelajaran dengan memberikan informasi dan tips tentang bagaimana menerapkan aturan lalu lintas di rumah.
  - c. Kerja Sama dengan Masyarakat: Menggalang kerja sama dengan kepolisian dan instansi terkait untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang hukum lalu lintas di sekolah.
  - d. Penguatan Kurikulum: Memperkuat kurikulum PKn dengan materi yang relevan dan up-to-date tentang hukum lalu lintas serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Saylendra & Sofyan, 2022).

Secara keseluruhan, PKn memiliki potensi besar untuk membangun kesadaran hukum lalu lintas di kalangan siswa jika dilaksanakan dengan pendekatan yang tepat dan melibatkan berbagai pihak. Dengan memperbaiki metode pengajaran, memperkuat kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta meningkatkan keterlibatan orang tua dan komunitas lokal, diharapkan kesadaran hukum lalu lintas di kalangan siswa dapat meningkat. Ini akan menghasilkan generasi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam berlalu lintas, yang pada gilirannya dapat

berkontribusi pada peningkatan keselamatan dan ketertiban di jalan raya.

## 2. Kendala Dalam Membangun Kesadaran Tentang Hukum Lalu Lintas Di Kelas VIIB SMPN 3 Sragen

Pendidikan global berbasis teknologi digital di era milenial menghadirkan transformasi signifikan dalam cara belajar dan mengajar, membuka akses pendidikan yang lebih luas dan inklusif. Teknologi digital, seperti platform e-learning, aplikasi pembelajaran, dan alat komunikasi online, memungkinkan siswa dari berbagai belahan dunia untuk mengakses materi pelajaran berkualitas tanpa batasan geografis, serta mendukung pembelajaran yang bersifat personalisasi dan adaptif (Lestyaningrum, Trisiana, Safitri, & Pratama, 2022). Namun, membangun kesadaran tentang hukum lalu lintas di kalangan siswa kelas VIIB SMPN 3 Sragen menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam pendidikan juga menghadapi tantangan tersendiri. Berbagai kendala, seperti kurangnya akses teknologi, minimnya pemahaman tentang pentingnya hukum lalu lintas, serta kesulitan dalam menerapkan kurikulum yang relevan, dapat menghambat efektivitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Oleh karena itu, penting untuk mengatasi tantangan ini dengan strategi yang efektif dan adaptif agar teknologi digital dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesadaran hukum

lalu lintas dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas.

a. Kurangnya Pemahaman Kontekstual dan Praktis

Salah satu kendala signifikan yang diidentifikasi adalah kurangnya pemahaman kontekstual dan praktis mengenai hukum lalu lintas di kalangan siswa. Meskipun materi tentang peraturan lalu lintas diajarkan di kelas, banyak siswa mengalami kesulitan dalam mengaitkan teori dengan aplikasi sehari-hari mereka. Materi ajar yang cenderung bersifat teoritis dan tidak disertai dengan pengalaman praktis atau simulasi membuat siswa sulit untuk memahami bagaimana hukum lalu lintas diterapkan dalam situasi nyata.

Misalnya, meskipun siswa dapat menghafal rambu-rambu lalu lintas dan batas kecepatan, mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami bagaimana aturan tersebut diterapkan saat mereka berada di jalan raya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pengajaran yang lebih interaktif dan kontekstual sangat diperlukan. Pendekatan ini dapat mencakup simulasi lalu lintas, studi kasus, dan kegiatan lapangan yang melibatkan situasi lalu lintas nyata. Dengan cara ini, siswa dapat memperoleh pengalaman langsung yang memungkinkan mereka untuk menghubungkan teori dengan praktik, serta

meningkatkan pemahaman mereka tentang penerapan hukum lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.

b. Kurangnya Sumber Daya dan Dukungan Eksternal

Terbatasnya sumber daya dan kurangnya dukungan eksternal yang mendukung proses pembelajaran PKn adalah kendala lain yang dihadapi tentang hukum lalu lintas. Banyak sekolah, termasuk SMPN 3 Sragen, mungkin tidak memiliki fasilitas atau materi ajar yang memadai untuk menyampaikan informasi tentang hukum lalu lintas dengan cara yang menarik dan efektif. Keterbatasan ini dapat mencakup kurangnya alat peraga, media pembelajaran, atau teknologi yang dapat digunakan untuk mengajarkan hukum lalu lintas secara interaktif. Selain itu, kurangnya dukungan dari pihak eksternal, seperti instansi kepolisian atau lembaga lalu lintas, juga menjadi hambatan.

Dukungan dari pihak eksternal ini sangat penting karena mereka dapat memberikan sosialisasi atau edukasi tambahan yang relevan tentang hukum lalu lintas. Kolaborasi yang kuat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat juga penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang komprehensif. Tanpa adanya dukungan yang memadai dari berbagai pihak, upaya untuk membangun kesadaran hukum lalu

lintas akan menjadi kurang optimal dan sulit untuk mencapai hasil yang diinginkan.

c. Keterlibatan Orang Tua dan Lingkungan Sekitar

Keterlibatan orang tua dan lingkungan sekitar juga merupakan faktor penting dalam membangun kesadaran hukum lalu lintas di kalangan siswa. Dalam banyak kasus, siswa mungkin tidak mendapatkan reinforcement atau penguatan yang konsisten mengenai aturan lalu lintas di rumah. Kurangnya komunikasi antara sekolah dan orang tua tentang pentingnya pemahaman hukum lalu lintas dapat mengurangi efektivitas pembelajaran di kelas. Orang tua memainkan peran yang signifikan dalam membentuk sikap dan perilaku anak-anak mereka terhadap hukum lalu lintas.

Selain itu, lingkungan sosial siswa, seperti kebiasaan berkendara yang tidak sesuai dengan peraturan di komunitas mereka, dapat mempengaruhi sikap dan perilaku siswa terhadap hukum lalu lintas. Misalnya, jika lingkungan sekitar siswa cenderung mengabaikan peraturan lalu lintas, siswa mungkin merasa bahwa pelanggaran adalah hal yang biasa dan tidak penting. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas harus melibatkan komunitas dan orang tua dapat bekerja sama untuk

membangun lingkungan yang mendukung penerapan aturan lalu lintas dan memberikan reinforcement yang konsisten di luar lingkungan sekolah.

d. Motivasi dan Kepedulian Siswa

Masalah motivasi dan kepedulian siswa terhadap hukum lalu lintas juga merupakan kendala penting dalam pembelajaran PKn. Siswa mungkin tidak melihat relevansi langsung dari peraturan lalu lintas dengan kehidupan mereka, terutama jika mereka belum memiliki pengalaman berkendara sendiri. Kurangnya pemahaman mengenai dampak pelanggaran lalu lintas terhadap keselamatan diri dan orang lain dapat mengurangi motivasi siswa untuk mematuhi aturan. Siswa mungkin merasa bahwa peraturan lalu lintas tidak berhubungan dengan kehidupan mereka saat ini dan kurangnya pengalaman pribadi membuat mereka kurang merasa terhubung dengan materi ajar.

Oleh karena itu, penting untuk menciptakan program pembelajaran yang menarik dan relevan bagi siswa. Pendekatan yang dapat digunakan termasuk mengaitkan materi ajar dengan situasi nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, dan mengadakan kegiatan yang dapat menunjukkan pentingnya peraturan lalu lintas secara langsung. Dengan cara ini, siswa dapat melihat relevansi peraturan lalu lintas dan memahami pentingnya mematuhi

aturan tersebut dalam konteks kehidupan mereka.

Secara keseluruhan, kendala-kendala tersebut memerlukan perhatian khusus dan solusi yang terintegrasi untuk mengatasi hambatan dalam membangun kesadaran hukum lalu lintas di kalangan siswa. Dengan memperbaiki pendekatan pengajaran meningkatkan dukungan eksternal, melibatkan keluarga dan komunitas, serta meningkatkan motivasi siswa, diharapkan kesadaran hukum lalu lintas dapat ditingkatkan secara signifikan di kelas VIIB SMPN 3 Sragen.

### 3. Solusi Efektif Apa Yang Dapat Meningkatkan Kesadaran Tentang Hukum Lalu Lintas Di Kelas VIIB SMPN 3 Sragen

Desain pengembangan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui ADDIE model—yang mencakup langkah Analisis, Desain, Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi—dapat secara signifikan meningkatkan karakter siswa dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Dalam tahap Analisis, kebutuhan dan tujuan karakter yang ingin dikembangkan diidentifikasi, sedangkan pada tahap Desain, rencana pembelajaran dirancang untuk memasukkan elemen karakter yang relevan, seperti nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan toleransi. Tahap Pengembangan melibatkan pembuatan materi dan aktivitas pembelajaran yang sesuai, yang kemudian diuji dan diterapkan

pada tahap Implementasi (Trisiana & Wartoyo, 2016).

Akhirnya, tahap Evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas model pembelajaran dalam mencapai tujuan karakter yang ditetapkan dan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Dalam konteks meningkatkan kesadaran tentang hukum lalu lintas di kalangan siswa kelas VIIB SMPN 3 Sragen, beberapa solusi efektif dapat diterapkan untuk mengatasi kendala yang ada dan memperkuat pemahaman serta penerapan peraturan lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari siswa. Beberapa pendekatan yang dapat dipertimbangkan termasuk integrasi teknologi digital untuk memperkaya materi pembelajaran, penggunaan metode interaktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa, dan pelaksanaan program pendidikan yang berkelanjutan untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan konsisten tentang hukum lalu lintas. Dengan menggabungkan pendekatan-pendekatan ini, model pembelajaran PKn dapat dioptimalkan untuk tidak hanya mengajarkan aspek hukum dan kewarganegaraan tetapi juga membentuk karakter siswa yang kuat dan berintegritas.

#### a. Pengembangan Metode Pembelajaran yang Interaktif dan Kontekstual

Salah satu solusi utama adalah mengembangkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual. Materi tentang

hukum lalu lintas sebaiknya disajikan melalui metode yang melibatkan partisipasi aktif siswa, seperti simulasi lalu lintas, studi kasus, dan kegiatan praktis. Misalnya, mengadakan simulasi di kelas di mana siswa berperan sebagai pengemudi, penegak hukum, atau pejalan kaki dapat memberikan pengalaman langsung tentang bagaimana peraturan lalu lintas diterapkan. Kegiatan ini dapat membantu siswa memahami dan mengingat peraturan lalu lintas dengan lebih baik karena mereka terlibat langsung dalam prosesnya.

b. Kolaborasi dengan Instansi dan Profesional

Berkenaan kolaborasi dengan instansi yang relevan seperti dinas perhubungan, kepolisian serta lembaga lalu lintas lainnya, juga merupakan solusi efektif. Mengundang narasumber dari instansi tersebut untuk memberikan sosialisasi atau workshop tentang hukum lalu lintas dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam dan otoritatif kepada siswa. Selain itu, kunjungan lapangan ke fasilitas lalu lintas, seperti pusat simulasi atau stasiun polisi, dapat memberikan pengalaman langsung tentang bagaimana hukum lalu lintas diterapkan dan ditegakkan. Kerjasama ini juga dapat membantu menyediakan materi ajar yang lebih relevan dan terkini (Nafisah, 2016).

c. Peningkatan Keterlibatan Orang Tua dan Komunitas

Melibatkan orang tua dan komunitas dalam pendidikan hukum lalu lintas sangat penting untuk memperkuat pembelajaran di sekolah. Sekolah dapat mengadakan seminar atau pertemuan orang tua yang membahas pentingnya kesadaran hukum lalu lintas dan cara orang tua dapat mendukung pembelajaran anak mereka di rumah. Selain itu, program komunitas yang melibatkan warga dalam kampanye kesadaran lalu lintas atau kegiatan edukasi dapat memperluas dampak pembelajaran dan memastikan bahwa pesan tentang hukum lalu lintas konsisten di lingkungan sekitar siswa. Dukungan dari keluarga dan komunitas dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan memperkuat pembelajaran yang dilakukan di sekolah.

d. Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran

Teknologi dapat digunakan sebagai alat bantu yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas. Penggunaan aplikasi edukasi, video interaktif, dan simulasi berbasis komputer dapat membuat materi tentang hukum lalu lintas lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Misalnya, aplikasi simulasi lalu lintas dapat memungkinkan siswa untuk mengalami situasi lalu lintas

secara virtual dan belajar bagaimana membuat keputusan yang tepat dalam situasi tersebut. Teknologi juga dapat menyediakan platform untuk kuis atau permainan yang menguji pengetahuan siswa tentang hukum lalu lintas secara menyenangkan.

e. Evaluasi dan Pengembangan Berkelanjutan

Untuk memastikan efektivitas pembelajaran PKn dalam membangun kesadaran hukum lalu lintas, evaluasi berkala dan pengembangan berkelanjutan diperlukan. Penilaian rutin terhadap pemahaman dan sikap siswa terhadap hukum lalu lintas dapat membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Selain itu, umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua dapat digunakan untuk menumbuhkan dan menyempurnakan metode pembelajaran. Program Pembelajaran PKn dapat terus diperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih optimal dengan melakukan evaluasi dan menyesuaikan yang tepat dalam membangun kesadaran hukum lalu lintas (Priambodo et al., 2024).

Dengan menerapkan solusi-solusi ini secara efektif, diharapkan kesadaran hukum lalu lintas di kalangan siswa kelas VIIB SMPN 3 Sragen dapat meningkat secara signifikan. Upaya ini tidak hanya akan membantu siswa memahami dan mematuhi peraturan lalu lintas tetapi juga

berkontribusi pada keselamatan dan ketertiban lalu lintas secara lebih luas.

## PEMBAHASAN

Di era globalisasi, komunikasi sosial budaya memainkan peran krusial dalam menjaga dan memperkuat identitas nasional serta nilai-nilai Pancasila. Globalisasi membawa pengaruh budaya dari berbagai belahan dunia yang dapat mempengaruhi nilai dan norma lokal. Dalam konteks ini, komunikasi sosial budaya berfungsi sebagai jembatan untuk menyebarluaskan dan menegakkan nilai-nilai Pancasila, seperti persatuan, keadilan sosial, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, di tengah arus globalisasi yang cepat. Melalui dialog yang terbuka dan berbasis pada nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat mempertahankan jati diri dan integritas budaya mereka sambil beradaptasi dengan perubahan global. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip Pancasila dalam komunikasi sosial budaya, kita dapat memastikan bahwa perkembangan global tidak mengikis, tetapi justru memperkaya pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan, yang pada gilirannya memperkuat kohesi sosial dan menciptakan harmoni dalam keragaman (Kaswadi, Wulandari, & Trisiana, 2018).

Namun, dalam konteks pendidikan kewarganegaraan di tingkat sekolah, tantangan yang dihadapi, seperti yang terjadi di SMPN 3 Sragen, menunjukkan adanya kendala dalam pengajaran dan pemahaman mengenai hukum lalu lintas. Kurangnya pemahaman kontekstual dan praktis di kalangan siswa mengenai hukum

lalu lintas sering kali disebabkan oleh materi ajar yang bersifat teoritis dan kurang terhubung dengan aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan siswa kesulitan memahami pentingnya hukum lalu lintas dan penerapannya di lapangan. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih interaktif dan relevan dengan konteks melalui metode yang digunakan, seperti penggunaan simulasi lalu lintas yang memungkinkan siswa merasakan dan berlatih dalam situasi lalu lintas yang mendekati kondisi sebenarnya. Selain itu, studi kasus mengenai permasalahan lalu lintas nyata dapat membantu siswa menganalisis dan memahami implikasi praktis dari hukum lalu lintas.

Kendala lain yang signifikan adalah terbatasnya sumber daya dan dukungan eksternal untuk mendukung pengajaran tentang hukum lalu lintas. Kolaborasi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan Dinas Perhubungan penting untuk menyediakan materi ajar yang lebih relevan dan memungkinkan kegiatan seperti kunjungan lapangan ke kantor kepolisian atau pusat pendidikan lalu lintas. Keterlibatan orang tua dan komunitas juga memainkan peran krusial dalam membangun kesadaran hukum lalu lintas. Program pendidikan atau workshop yang melibatkan orang tua serta dukungan dari komunitas dalam bentuk kampanye kesadaran lalu lintas dapat memperluas dampak pembelajaran dan menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan peraturan lalu lintas di luar sekolah.

Masalah motivasi dan kepedulian siswa terhadap hukum lalu lintas juga perlu ditangani dengan serius. Mengaitkan materi ajar dengan situasi nyata dan menggunakan teknologi modern seperti aplikasi edukasi dan simulasi berbasis komputer dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan bermanfaat. Teknologi ini memungkinkan siswa berinteraksi dengan materi ajar dalam cara yang lebih dinamis dan stimulatif, meningkatkan pemahaman mereka tentang relevansi hukum lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi berkala dan pengembangan berkelanjutan dari metode pembelajaran juga penting untuk memastikan bahwa program Pendidikan Kewarganegaraan tetap relevan dan efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan siswa terhadap peraturan lalu lintas.

Dengan mengatasi kendala-kendala ini melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi, diharapkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMPN 3 Sragen dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman siswa tentang hukum lalu lintas dan berkontribusi pada keselamatan serta ketertiban lalu lintas di masyarakat, sambil tetap memperkuat identitas nasional dan nilai-nilai Pancasila di tengah arus globalisasi.

## **SIMPULAN**

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di kelas VIIB SMPN 3 Sragen memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum lalu lintas di kalangan siswa. Melalui materi PKn yang disampaikan, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan mengenai hak

dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga memahami aturan lalu lintas yang meliputi rambu-rambu, batas kecepatan, serta etika berkendara. Tujuan utama dari pembelajaran ini adalah untuk membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab dan sadar akan hukum, serta mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Implementasi PKn yang efektif dapat menciptakan generasi yang lebih disiplin dan peduli terhadap keselamatan di jalan raya.

Namun, beberapa kendala signifikan telah diidentifikasi dalam upaya membangun kesadaran hukum lalu lintas. Kurangnya pemahaman kontekstual dan praktis tentang penerapan hukum lalu lintas, keterbatasan sumber daya dan dukungan eksternal, serta kurangnya keterlibatan orang tua dan komunitas menjadi hambatan utama. Siswa sering kali mengalami kesulitan dalam mengaitkan teori dengan praktik sehari-hari mereka, sementara dukungan yang terbatas dari pihak eksternal dan lingkungan sekitar juga menghambat efektivitas pembelajaran PKn. Motivasi dan kepedulian siswa yang rendah terhadap hukum lalu lintas juga memperburuk situasi ini.

Untuk mengatasi kendala tersebut, solusi efektif perlu diterapkan. Pengembangan metode pembelajaran yang lebih partisipatif dan relevan dengan kontekstual, seperti simulasi lalu lintas atau studi kasus, dapat membantu siswa mengaitkan teori dengan praktik. Kolaborasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian dan lembaga lalu lintas, serta peningkatan keterlibatan orang tua dan

komunitas juga penting untuk memperkuat pembelajaran. Integrasi teknologi dalam pembelajaran dan evaluasi berkala terhadap program PKn dapat meningkatkan efektivitas dan relevansi materi ajar. Pendekatan-pendekatan ini diharapkan dapat memperbaiki pemahaman siswa mengenai hukum lalu lintas dan memotivasi mereka untuk mematuhi peraturan.

Secara keseluruhan, PKn di SMPN 3 Sragen memiliki potensi besar dalam membangun kesadaran hukum lalu lintas jika dilaksanakan dengan pendekatan yang tepat. Dengan memperbaiki metode pengajaran, meningkatkan dukungan eksternal, serta melibatkan keluarga dan komunitas, diharapkan siswa dapat lebih memahami dan menghargai aturan lalu lintas. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan siswa tetapi juga berkontribusi pada keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Penerapan solusi-solusi yang telah diidentifikasi akan membantu menciptakan generasi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam berlalu lintas, memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.



## DAFTAR RUJUKAN

- Asyafiq, S. (2016). Berbagai pendekatan dalam pendidikan nilai dan pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(1), 29-37.
- Ayu, F. M. S., & Trisiana, A. (2017). Penguatan Pancasila Dalam Perbuatan (Alternatif Tindakan Kuratif Di Era Globalisasi). *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(2).
- Belladonna, A. P., & Anggraena, S. N. (2019). Penguatan pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 196-210.
- Kaswadi, D. A., Wulandari, E., & Trisiana, A. (2018). Pentingnya Komunikasi Sosial Budaya Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Nilai Pancasila. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2).
- Lestyaningrum, I. K. M., Trisiana, A., Safitri, D. A., & Pratama, A. Y. (2022). *Pendidikan global berbasis teknologi digital di era milenial*. Unisri Press.
- Nafisah, D. (2016). Peran pendidikan muatan lokal terhadap pembangunan karakter bangsa. *Citizenship Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 451-468.
- Oktari, D., & Dewi, D. A. (2021). Pemicu luntarnya nilai pancasila pada generasi milenial. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 93-103.
- Pratiwi, R., & Trisiana, A. (2020). Pentingnya peran guru PKn dalam membangun moral anak bangsa. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 11(2).
- Priambodo, B., Sari, S., Priyono, N., Mare, I. C. S., Silviandini, A., & Ratnasih, P. (2024). Menumbuhkan Karakter Kejujuran Melalui Pendidikan Dan Nilai-Nilai Pancasila Yang Luhur. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 2(2), 01-11.
- Rizal, R. (2020). Peran Guru Pkn Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Siswa Di Sma Negeri 1 Jatirogo. *Jurnal Pendidikan Edutama*.
- Sanusi, A. R., & Darmawan, C. (2016). Implementasi pendidikan politik dalam membentuk karakter kepemimpinan lintas budaya pada generasi muda demi mewujudkan budaya politik pancasila (Studi deskriptif terhadap organisasi kepemudaan

- Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 24-40.
- Saylendra, N. P., & Sofyan, F. S. (2022). Upaya Pengembangan Nilai Sadar Hukum pada Mahasiswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Boardgame. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(1), 44-54.
- Setiarsih, A. (2017). Diskursus pendidikan kritis (critical pedagogy) dalam kajian pendidikan kewarganegaraan. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 76-85.
- Sutrisno, S. (2018). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Warga Negara Global. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1).
- Trisiana, A. (2020). Penguatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui digitalisasi media pembelajaran. *Jurnal pendidikan kewarganegaraan*, 10(2), 31-41.
- Trisiana, A., & Wartoyo, W. (2016). Desain pengembangan model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui ADDIE model untuk meningkatkan karakter mahasiswa di Universitas Slamet Riyadi Surakarta. *PKn Progresif*, 11(1), 159079.
- Wahyuni, N., & Fitriani, W. (2022). Relevansi Teori Belajar Sosial Albert Bandura dan Metode Pendidikan Keluarga dalam Islam. *Qalam: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 11(2), 60-66.
- WISUDAWATI, D. (2018). *PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING (PjBL) UNTUK MEMBANGUN SIKAP TAAT TERHADAP PERATURAN LALU LINTAS KENDARAAN RODA DUA PADA SISWA SMP* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).